

# **PERAN PEREMPUAN PADA SEKTOR DOMESTIK DAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA**

**Penny Rahmawaty, M.Si**  
**Staf Pengajar Prodi Manajemen, FISE Universitas Negeri Yogyakarta**  
[penny\\_rahmawaty@yahoo.com](mailto:penny_rahmawaty@yahoo.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kaum perempuan pada sektor domestik (bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi) dan sektor publik (instansi pemerintah yang berada di wilayah administratif Kota Yogyakarta, TNI/POLRI dan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi profesi). Disamping itu penelitian ini juga akan menghasilkan data yang telah terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk sektor domestik dan publik yang ada di Kota Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah semua warga masyarakat Kota Yogyakarta yang terbagi ke dalam 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 blok yang terdiri atas 672 KK. Pengambilan sampel blok untuk masing-masing kecamatan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan karakter masing-masing kecamatan. Metode pengumpulan data pokok yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, wawancara juga dilakukan pengumpulan data sekunder dan semi sekunder, untuk memperoleh data pilah dari berbagai instansi maupun organisasi di tingkat kota dan kecamatan. Selain itu juga dilakukan pendekatan observasi (pengamatan) untuk lebih dapat memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi memiliki anak menjadi penting karena ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada, akan berdampak pada bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Mayoritas responden mengatakan memiliki anak perempuan dan laki-laki sama saja (80,6%) tetapi yang lebih suka anak laki-laki ternyata lebih banyak daripada yang suka anak perempuan (10,2% dengan 9,2%) sehingga dapat dikatakan disini bahwa kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta akan perlunya relasi gender relatif lebih baik. Di bidang pendidikan menunjukkan bahwa angka buta huruf yang dialami perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Besarnya persentase angka buta huruf bagi perempuan adalah 15,4% sementara laki-laki hanya sebesar 9%. Di bidang kesehatan partisipasi perempuan cukup meingkat dilihat dari kecilnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil. Selain itu kesadaran masyarakat untuk berobat ke Puskesmas cukup tinggi. Kedudukan kaum perempuan di instansi pemerintah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta lebih banyak berada pada tingkat administratif dan hanya sedikit sebagai pengambil kebijakan. Mereka yang mencapai level kepangkatan golongan IV masih terbatas. Partisipasi perempuan yang bekerja di sektor swasta di Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih lebih kecil dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan lebih banyak bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan sektor perdagangan. Bila dilihat dari kedudukan kaum perempuan dalam organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi profesi lebih banyak berada pada jabatan bendahara.

Kata kunci: Data pilah, sektor domestik, sektor publik

## **Pendahuluan**

Pembangunan yang berperspektif gender yang selama ini digerakkan pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk itu belum bersifat strategis. Pemerintah pusat apalagi daerah belum mempunyai peta persoalan yang sesungguhnya yang dihadapi kaum perempuan di lapangan. Pemerintah selalu bercermin pada norma-norma yang berlaku. Itulah sebabnya, cara pandang pemerintah seringkali bertolak belakang dengan para aktivis di lapangan dalam melihat nasib perempuan.

Visi Pembangunan Nasional bertujuan mengantarkan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.

Dengan visi seperti itu didukung lagi dengan berbagai output legislasi yang seolah mendorong keadilan gender, pemerintah merasa persoalan gender di tanah air sudah selesai, tinggal pelaksanaannya saja. Ternyata asumsi itu keliru. Buktinya, sejak pertama kali program pemberdayaan perempuan digalakkan pemerintah, era orde baru, kondisi perempuan hingga saat ini belum bergerak secara signifikan. Ketimpangan laki-laki dan perempuan masih ada. Posisi-posisi pengambil keputusan baik di sektor pemerintah maupun swasta masih dipegang laki-laki. Di dunia politik posisi perempuan masih dipinggir sekali.

Sejauhmana ketimpangan laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah belum memperoleh informasi yang memadai. Data statistik selama ini belum menyentuh arena persaingan laki-laki dan perempuan dalam merebut posisi. Statistik lebih fokus pada data yang berasal di rumah tangga. Padahal persaingan lebih banyak ada di sektor publik.

Data lengkap yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan diberbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta, sangat diperlukan, agar pemerintah dapat membuat

kebijakan yang lebih fokus dan menyentuh nasib perempuan di lapisan bawah. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab persoalan peta kondisi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan di sektor domestik maupun publik

Data yang dikumpulkan ini tidak hanya berasal dari sektor domestik, tetapi juga sektor publik. Sampel untuk sektor domestik sebanyak 672 KK. Sementara untuk sektor publik adalah semua instansi, pemerintah maupun swasta, organisasi massa maupun politik, yang bersifat keagamaan maupun tidak. Semua dilihat strukturnya, untuk mengetahui dimana posisi perempuan. Termasuk pada instansi kepolisian dan TNI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kaum perempuan pada sektor domestik (bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi) dan sektor publik (instansi pemerintah yang berada di wilayah administratif Kota Yogyakarta, TNI/POLRI dan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi profesi). Disamping itu penelitian ini juga akan menghasilkan data yang telah terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk sektor domestic dan public yang ada di Kota Yogyakarta

Populasi penelitian ini adalah semua warga masyarakat Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 672 KK. Penarikan sampel dilakukan berdasarkan sistem blok. Pengambilan sampel blok untuk masing-masing kecamatan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan karakter masing-masing kecamatan. Dari cara seperti ini terpilih sebanyak 41 Blok (672 KK). Metode pengambilan sampel blok yang dilakukan disini sudah sesuai dengan langkah pengambilan sampel menurut standar statistik pada umumnya. Setelah diperoleh sampel blok untuk masing-masing kecamatan tahap berikutnya adalah menentukan kelurahan mana saja yang diambil sebagai sampel, karena tidak semua kelurahan dapat terakomodir. Proses pemilihan kelurahan atau desa didasarkan pada pengelompokkan masing-masing kelurahan/desa menurut jumlah penduduk, karakteristik alam dan kondisi sosial budayanya. Bila sudah dipastikan homogen tetapi jumlah kelurahan masih berlebih maka solusinya adalah melalui penentuan sampel secara acak (random). Semua langkah ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalisir bias data atau mendekati representative kondisi sebenarnya.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner (*interview guide*) yang berisi tentang pertanyaan mengenai masalah-masalah umum, seperti kondisi rumah, kepemilikan rumah, kepemilikan perabot rumah tangga. Kemudian masuk mengenai pertanyaan seputar masalah demografi atau kependudukan, dilanjutkan masalah pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Metode pengumpulan data pokok yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, wawancara juga dilakukan pengumpulan data sekunder dan semi sekunder, untuk memperoleh data pilah dari berbagai instansi maupun organisasi di tingkat kota dan kecamatan. Selain itu juga dilakukan pendekatan observasi (pengamatan) untuk lebih dapat memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya.

Analisis data untuk data kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif dan menggunakan teknik pengukuran statistik. Untuk data kualitatif tingkat validasinya dilakukan metode triangulasi.

## **Pembahasan**

Wilayah Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2532 RT dengan wilayah seluas 32,5 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 1,02% dari luas Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus Penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -0,37 persen. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2005 tercatat 435.236 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,87 persen laki-laki dan 51,13 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100

penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 13.392 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat 9.369 orang, yang terdiri dari 87,79 persen pegawai pemerintah daerah dan 12,21 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 1,41 persen, golongan II 19,55 persen, golongan IV 27,55 persen.

Hasil penelitian ini diuraikan dalam dua tahap yaitu analisis data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Kedua, analisis data semi primer yang dikumpulkan dari berbagai instansi baik negeri maupun swasta serta organisasi massa maupun politik. Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terdiri dari empat bidang bahasan yaitu (1) kependudukan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; dan (4) ketenagakerjaan. Data kependudukan dijabarkan dalam bentuk: (1) preferensi untuk memiliki anak; (2) hubungan jenis pekerjaan dengan preferensi memiliki anak; (3) hubungan tingkat pendidikan dengan preferensi memiliki anak; (4) jumlah anak kandung yang dimiliki; (5) penduduk usia lanjut; dan (6) usia perkawinan pertama.

## **1. Bidang Kependudukan**

Dari data kependudukan tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya orang tua melihat bahwa memiliki anak perempuan dan anak laki-laki sama saja (80,6%), tetapi yang lebih suka anak laki-laki ternyata lebih banyak daripada yang suka anak perempuan (10,2% dengan 9,2%). Sedangkan untuk hubungan jenis pekerjaan dengan preferensi memiliki anak maka mereka yang lebih suka memiliki anak laki-laki adalah para pedagang, petani, buruh dan mereka yang menjadi anggota TNI/POLRI. Sementara mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta kecenderungannya lebih suka anak perempuan daripada anak laki-laki. Sementara itu tidak ada kaitan antara kecenderungan untuk lebih menyukai memiliki anak laki-laki dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan orangtua, karena dilihat dari tingkat pendidikan orangtua mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi kecenderungannya lebih menyukai anak laki-laki.

Mengetahui preferensi memiliki anak adalah penting untuk dideskripsikan di sini, karena ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada, akan berdampak pada bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Bagi petani atau buruh bisa saja akan lebih memperhatikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuannya karena dia lebih berharap mendapatkan anak laki-laki. Mungkin anak laki-laki mempunyai nilai yang lebih dibandingkan anak perempuan dalam pandangannya. Menariknya, mayoritas mengatakan sama saja, sehingga dapat dikatakan disini bahwa kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta akan perlunya relasi gender relatif lebih baik. Persepsi positif ini tinggal didorong untuk dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

Responden yang memiliki satu anak perempuan lebih banyak dari pada yang memiliki anak laki-laki (42,5% : 41,7%). Sedangkan responden yang memiliki anak laki-laki lebih dari satu (2 orang) lebih besar daripada responden yang memiliki anak perempuan (25,6% : 23,4%). Begitu pula yang memiliki 3 orang bahkan 8 orang anak laki-laki ternyata lebih besar daripada anak perempuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden lebih banyak yang memiliki anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Anggota rumah tangga (ART) yang berusia lanjut (60 tahun ke atas) relatif lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan (25,7% : 23,9%). Jika dilihat dari usia perkawinan pertama, menyebutkan bahwa responden umumnya menikah pada usia 20 sampai 25 tahun yaitu sebanyak 48,3%. Diikuti oleh usia 26 sampai 29 tahun (15,5%), menariknya bahwa mereka yang menikah pada usia dibawah 15 tahun juga relatif banyak (7,5%).

## **2. Bidang Pendidikan**

Untuk bidang pendidikan dapat dilihat dari (1) angka buta huruf; (2) hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap angka buta huruf; (3) hubungan lokasi dengan angka buta huruf; (4) partisipasi anak usia sekolah; (5) siswa putus sekolah; (6) tingkat pendidikan orangtua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka buta huruf yang dialami perempuan (dari hasil penelitian) relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Besarnya persentase angka buta huruf bagi perempuan adalah 15,4% sementara laki-laki hanya sebesar 9%. Angka buta huruf

dalam keluarga juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orangtua. Dari data menunjukkan bahwa angka buta huruf tertinggi umumnya berasal dari orangtua yang pendidikannya rendah yakni tamat Sekolah Dasar atau bahkan tidak tamat SD. Sedangkan bila dilihat dari lokasi, angka buta huruf laki-laki banyak terdapat pada kecamatan Jetis, Tegalrejo dan Gondokusuman

Angka partisipasi anak usia 4 sampai 6 tahun atau setara dengan usia sekolah taman kanak-kanak (TK) menyebutkan bahwa antara anak perempuan dan laki-laki relatif sama, yaitu sebesar 8,2%. Sedangkan untuk anak usia 7 sampai 12 tahun atau setara usia sekolah dasar menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan (22,7% : 20,5%). Untuk anak usia 13 sampai 15 tahun (setara usia sekolah menengah pertama) menyebutkan bahwa angka partisipasi anak laki-laki juga lebih besar dibandingkan anak perempuan (12,4% : 11,4%). Anak usia 16 sampai 18 tahun atau setara usia sekolah menengah atas menyebutkan bahwa untuk anak laki-laki sebesar 11,3% sedangkan untuk anak perempuan sebesar 10,1%. Terakhir untuk usia 19 sampai 24 tahun (usia perguruan tinggi) menyebutkan untuk anak laki-laki yang kuliah sebanyak 6,7% sementara untuk anak perempuan sebesar 6%.

Jumlah siswa yang putus sekolah (drop out) secara keseluruhan menyebutkan bahwa anak laki-laki sebesar 2,3% sementara anak perempuan sebesar 2,1% (data dari hasil survey). Dilihat dari masing-masing tingkatan menyebutkan drop out (DO) pada tingkat SD untuk anak laki-laki sebesar 0,9% dan anak perempuan sebesar 1%. DO pada tingkat SMP menunjukkan bahwa untuk anak laki-laki sebesar 1,9% dan anak perempuan sebesar 1,6%. Pada tingkat SMA, jumlah anak laki-laki yang DO sebesar 3% dan anak perempuan sebesar 3,4%. Terakhir, pada tingkat perguruan tinggi, jumlah mahasiswa yang tidak melanjutkan sebesar 1,7% untuk anak laki-laki dan 1,9% untuk anak perempuan. Jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah (DO) lebih banyak dialami oleh keluarga yang orangtuanya bekerja sebagai petani atau buruh.

Bila dilihat tingkat pendidikan orangtua, menyebutkan bahwa tingkat pendidikan bapak rata-rata adalah lulusan SMA (32%) sementara ibu rata-rata pendidikannya adalah

tamat SD (29%). Tetapi jumlah ibu yang tamat SMA juga cukup besar yaitu 28% dan sebaliknya untuk bapak yang hanya tamat SD juga besar yaitu mencapai 24,8%.

### **3. Bidang Kesehatan**

Sektor domestik lain adalah bidang kesehatan. Data yang dikumpulkan dibagi ke dalam (1) jumlah bayi lahir selamat; (2) jumlah bayi lahir mati; (3) kematian balita; (4) kematian ibu hamil; (5) kematian ibu melahirkan; (6) jenis penyakit yang dialami masyarakat; (7) tempat tujuan berobat anggota keluarga jika sakit; dan (8) pemberian ASI dan susu selain ASI.

Berdasarkan hasil survey, selama tahun 2007 (Januari hingga Oktober) tidak terdapat kelahiran bayi laki-laki sebanyak 96,4% dan bayi perempuan 96,7%. Sedangkan kelahiran bayi laki-laki yang selamat sebanyak 3,6% dan 3,2% untuk bayi perempuan. Selama tahun 2007 jumlah bayi lahir mati tercatat sebanyak 7 anak, 4 bayi perempuan dan 3 bayi laki-laki dengan persentase 0,2% dan 0,1%. Dari hasil survey menunjukkan bahwa selama tahun 2007 tidak tercatat adanya kematian balita, setidaknya pada semua responden

Selama tahun 2007 atas tercatat ada satu ibu hamil yang meninggal (0,01%) tetapi secara umum tidak terdapat kematian ibu hamil.

Jenis penyakit yang umum dialami masyarakat, antara lain typhus, demam berdarah dan disentri. Bila dilihat menurut jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan yang terkena ketiga penyakit itu. Sedangkan untuk jenis penyakit batuk pilek meskipun sama-sama banyak dialami laki-laki maupun perempuan, namun frekuensi yang dialami laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, khususnya laki-laki remaja maupun anak-anak dan balita

Penelitian ini juga melihat kecenderungan anggota keluarga untuk pergi ke tempat pengobatan jika sakit. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan jasa Puskesmas untuk berobat.

Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, umumnya memperoleh ASI selama 13 bulan hingga 24 bulan. Untuk bayi laki-



laki yang diberi ASI antara 13-24 bulan sebesar 59,46% dan bayi perempuan berjumlah 59,89%. Untuk anak perempuan dan laki-laki yang tidak diberi ASI masing-masing sebesar 2,11% dan 2,10%. Serta yang tidak mendapat ASI eksklusif (kurang dari 4 bulan) tercatat untuk bayi perempuan sebesar 3,69% sementara untuk bayi laki-laki sebesar 2,36%.

Pada bagian lain juga diterangkan bahwa terdapat 42,7% yang diberikan susu selain ASI dan 38,8% tidak diberikan susu selain ASI.

#### **4. Bidang Ketenagakerjaan**

Bidang ketenagakerjaan dijabarkan ke dalam (1) jumlah pencari kerja; (2) Anggota Rumah Tangga (ART) bekerja 35 jam per minggu; (3) ART bekerja kurang dari 35 jam per minggu; (4) jenis pekerjaan bapak dan ibu; (5) hubungan jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan; (6) penghasilan keluarga dan (7) pengeluaran keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah laki-laki pencari kerja di kota Yogyakarta (sesuai sampel) melebihi jumlah perempuan. Laki-laki sebesar 27,7% sementara perempuan sebesar 21,3%. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa jumlah pengangguran perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Namun ini baru dilihat dari satu sisi. Ternyata dilihat dari jumlah mereka yang bekerja 35 jam per minggu, menyebutkan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Dapat juga dikatakan di sini bahwa dalam dunia kerja posisi perempuan tertinggal dan akan tertinggal di waktu mendatang karena jumlah pencari kerja lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para kepala keluarga (bapak) sangat beragam. Dari 30 jenis pekerjaan yang diberikan dalam alternatif jawaban, hanya ada 7 jenis pekerjaan yang menonjol. Pertama adalah mereka yang bekerja sebagai petani (pemilik lahan) ada 14,1%. Kemudian disusul mereka yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 7,4%. Ketiga, mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan sebanyak 6,8%, keempat, mereka yang bekerja sebagai PNS (bukan guru atau dosen) sebanyak 6,8%, kelima, yang bekerja sebagai karyawan swasta sejumlah 6,7%, keenam, mereka yang bekerja sebagai petani penggarap sejumlah 4,3% dan terakhir adalah mereka yang bekerja sebagai PNS Guru sebanyak 3,6%.

Sementara untuk pekerjaan yang dilakukan ibu, jika diambil dari 7 jenis pekerjaan (relatif sama dengan bapak) maka urutannya adalah sebagai berikut: (1) petani pemilik tanah (mungkin bekerjasama dengan bapak) sejumlah 13%; (2) bekerja sebagai pedagang di rumah, buka warung atau sejenisnya, berjumlah 11%; (3) bekerja sebagai buruh tani sebanyak 8,3%; (4) bekerja sebagai pedagang di pasar sebanyak 7,9%; (5) menjadi PNS guru sebesar 3,7%; (6) petani penggarap sebanyak 3,1% dan (7) mereka yang berjualan keliling berjumlah 2,6%.

Disamping melihat jenis pekerjaan yang dilakukan oleh ibu (istri), perlu juga untuk diketahui jumlah istri yang bekerja dan memiliki penghasilan (secara ekonomi) lebih besar dari suami. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa istri yang bekerja mencari nafkah sebesar 52,43% dan penghasilan istri yang lebih besar dari suami sejumlahnya 13%

## **5. Analisis Data Semi Primer**

Analisis Data Semi Primer dilakukan terhadap data semi primer yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi menarik mengenai kondisi perempuan dan laki-laki dari berbagai instansi pemerintah yang ada di Kota Yogyakarta. Susunan bahasan di mulai dengan kondisi pegawai pemerintah menurut kepangkatan dan jenis kelamin termasuk instansi TNI dan Kepolisian, serta penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Kedua, mengenai kondisi perempuan dan laki-laki yang menjabat sebagai pegawai pada instansi kecamatan dan kelurahan atau desa. Ketiga, kondisi perempuan di perusahaan-perusahaan swasta, posisi perempuan pada struktur ormas dan orsospol

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan yang menduduki golongan III dan IV masih terbatas bahkan pada beberapa instansi tidak ada pegawai perempuan yang bergolongan IV (bagian umum Sekretarita Daerah). Untuk TNI/POLRI kepangkatan tertinggi yang dicapai adalah golongan III dengan jumlah 2 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dan inipun hanya berada di MAKODIM. Sedangkan di instansi Kepolisian Berdasarkan pangkat yang terbanyak adalah berpangkat BRIPTU sebanyak 462 orang yang terdiri dari 449 orang laki-laki (97%) dan 13 orang perempuan (3%) diikuti oleh BRIPDA (396 orang) dengan rincian 379 orang laki-laki (96%) dan 17 orang

perempuan (4%). Urutan ketiga adalah AIPTU sebanyak 320 orang dengan rincian 314 orang laki-laki (98%) dan 6 orang perempuan (2%); berikutnya adalah BRIGADIR sebanyak 234 orang yang terdiri dari 230 orang laki-laki (98%) dan 4 orang perempuan (2%). Secara keseluruhan terlihat bahwa distribusi kepangkatan yang didasarkan pada jenis kelamin di lingkungan POLTABES Kota Yogyakarta masih didominasi oleh laki-laki. Kaum perempuan paling banyak hanya sekitar 4%.

Jumlah pegawai negeri sipil yang berada di institusi Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta adalah 78 orang yang terdiri dari 55 orang laki-laki (71%) dan 23 orang perempuan (29%). Pangkat dan golongan tertinggi adalah Golongan IV sebanyak 2 orang laki-laki, sedangkan untuk golongan III sejumlah 51 orang dengan rincian 35 orang laki-laki (67%) dan 16 orang perempuan (33%).

Jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah 98 orang terdiri dari 64 orang laki-laki (65%) dan 34 orang perempuan (35%). Berdasarkan golongan kepangkatan menyebutkan untuk Golongan IV terdapat 16 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki (75%) dan 4 orang perempuan (25%). Sedangkan untuk golongan III terdapat 67 orang yang terdiri dari 38 orang laki-laki (57%) dan 29 orang perempuan (43%). Pada lingkup pengadilan tinggi terlihat bahwa distribusi kepangkatan dan golongan berdasarkan jenis kelamin relatif telah merata.

Analisis berikutnya adalah melihat kondisi perempuan dan laki-laki yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil pada instansi kecamatan dan kelurahan atau desa. Jumlah keseluruhan PNS di lingkungan Kecamatan se Kota Yogyakarta adalah sebanyak 283 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 190 orang (67%) dan sisanya 93 orang perempuan (33%). Berdasarkan pangkat dan golongan dapat dijelaskan bahwa untuk golongan IV di seluruh kecamatan hanya terdapat 11 orang laki-laki (100%) dan tidak ada pegawai perempuan yang bergolongan IV. Sebaran terbesar terletak pada golongan III yaitu sebanyak 153 orang dengan rincian 102 orang laki-laki (67%) dan 51 orang perempuan (33%).

Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil pada instansi Kelurahan di Kota Yogyakarta adalah 353 orang yang terdiri dari 245 orang laki-laki (69%) dan 108 orang perempuan (31%). Berdasarkan jenjang kepangkatan tidak ada pegawai yang mencapai golongan IV, yang

terbanyak adalah golongan III dengan jumlah 290 orang yang terdiri dari 187 orang laki-laki (64%) dan 103 perempuan (36%) disusul oleh golongan II sebanyak 62 orang yang terdiri dari 57 orang laki-laki (92%) dan 5 orang perempuan (8%). Sedangkan untuk golongan I hanya ada 1 orang laki-laki (100%).

Kondisi perempuan dan laki-laki dalam organisasi massa, orsospol dan organisasi profesi. Organisasi massa dan profesi yang ada di Kota Yogyakarta berkembang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun belum banyak organisasi-organisasi tersebut yang mendaftarkan keberadaannya kepada instansi terkait. Hal ini akan mempersulit proses pembinaan dan pengawasan dari institusi pemerintah. Di kota Yogyakarta tercatat hanya ada 6 organisasi massa dan profesi, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pedagang Emas dan Perak Indonesia (APEPI), PDM, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Yayasan Janabadra, dan IKABI. Dari ke enam organisasi tersebut posisi strategis yaitu ketua dijabat oleh laki-laki (5 organisasi) kecuali pada KADIN yang dijabat oleh perempuan. Begitu pula dengan posisi pengurus lainnya seperti wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara yang mayoritas dijabat oleh laki-laki, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kaum perempuan untuk berkiprah di organisasi massa dan profesi masih sangat terbatas.

Pemandangan demikian ternyata juga dijumpai pada keterlibatan perempuan di dalam kepengurusan partai politik. Dari 6 partai politik besar yang ada di Kota Yogyakarta (PDIP, PPP, GOLKAR, PKS, Demokrat, dan PAN), posisi ketua partai semuanya dijabat oleh laki-laki. Sedangkan untuk posisi wakil ketua partisipasi perempuan mulai tampak, meskipun relatif terbatas jumlahnya. Dari sejumlah 57 orang wakil ketua, hanya 8 orang yang dijabat oleh perempuan (14%), sedangkan sisanya 49 orang (84%) adalah laki-laki. Sedangkan untuk jabatan wakil bendahara keterlibatan perempuan lebih besar dibandingkan jabatan yang lain (29%).

Partisipasi perempuan yang bekerja di sektor swasta di Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih lebih kecil dibandingkan kaum laki-laki (17.665 orang < 32,336 orang). Karyawan perempuan lebih banyak bekerja pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa kemasyarakatan pada skala usaha besar (2.835 orang) disusul pada sektor perdagangan (2.604

orang) dan industri pengolahan (1.791 orang). Sedangkan pada skala usaha sedang, menengah dan kecil bidang usaha yang banyak mempekerjakan karyawan perempuan adalah sektor perdagangan.

## **Kesimpulan**

Penelitian mengenai data pilah menjadi sangat penting untuk mengetahui partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai sektor. Kedudukan dan peranan perempuan di sektor domestik (bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan) masih cukup tertinggal dibandingkan laki-laki. Kedudukan kaum perempuan di instansi pemerintah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta lebih banyak berada pada tingkat administratif dan hanya sedikit sebagai pengambil kebijakan. Mereka yang mencapai level kepangkatan golongan IV masih terbatas. Partisipasi kaum perempuan di dunia kerja juga masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan lebih banyak bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan sektor perdagangan. Bila dilihat dari kedudukan kaum perempuan dalam organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi profesi lebih banyak berada pada bendahara.

## **Rekomendasi**

Peran pemerintah dalam memberikan kesempatan dan akses bagi kaum perempuan untuk mendapatkan layanan dan kesempatan bekerja dan berusaha harus ditingkatkan sehingga kaum perempuan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

BPS, 2007, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*, Yogyakarta: Pemkot Yogyakarta & BPS Kota Yogyakarta.

BPS, 2005, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2004/2005*, Yogyakarta: Pemkot Yogyakarta & BPS Kota Yogyakarta.

Statistik Kesejahteraan Rakyat DIY, 2003

